

PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

Jaminan Mutu dan Kualitas

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti: halaman kosong, tidak berurutan, terbalik, silakan menukar ke toko tempat Anda membeli atau menukar langsung pada kami, dan kami akan mengganti segera dengan buku yang sama dan lebih baik.

Dicetak oleh Percetakan **ARSIR OFFSET**, Yogyakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dr. Ridwan, SE, M.Si

PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL



©Pembangunan Ekonomi Regional
Dr. Ridwan, SE, M.Si
All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari
isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit Pustaka Puitika.

ISBN: 978-602-1621-83-7

Editor : Tuty Suciaty Razak
Desain Isi : Puitika Studio
Desain Cover : @NAME_19

Cetak Pertama, Desember 2016

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit:
Pustaka Puitika
Jl. Imogiri Barat. Km 4,5 Randu Belang. Rt. 08
Bangunharjo. Sewon. Bantul. Yogyakarta.
E-mail: pustakapuitika@yahoo.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
BAB I: RUANG LINGKUP EKONOMI REGIONAL	11
A. Pengertian Ekonomi Regional	11
B. Tujuan Ilmu Ekonomi Regional	14
C. Manfaat Ilmu Ekonomi Regional	16
D. Pentingnya Dimensi Regional dan Spasial dalam Perencanaan Pembangunan	17
BAB II: TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL	19
A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Regional	19
a. Aliran Klasik	20
b. Aliran Neoklasik	22
c. Aliran Keynes dan Pasca Keynes	24
B. Teori Basis Ekspor (Export Base Theory)	25
C. Teori Sektor (Sector Theory of Growth)	26
D. Teori Kausasi Kumulatif (Commulative Causation Theory)	31
E. Teori Lokasi dan Aglomerasi	33
F. Teori Tempat Sentral	42
a. Gejala Dinamis dan Pertumbuhan Wilayah	44
b. Tiga Konsep Fundamental	46
c. Sumbangan Positif Teori Tempat Sentral	46
G. Teori Kutub Pertumbuhan	47
a. Beberapa Kritik	49
b. Kegagalan Dampak Pertumbuhan ke Wilayah Pengaruh	51
c. Suntikan Dana dan Investasi untuk Pembangunan Wilayah Pengaruh	53
H. Teori Pembangunan Polarisasi	55
a. Pembangunan dan Inovasi	58
BAB III: PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL	62

A. Faktor Lingkungan	63
a. Sosial	63
b. Budaya	64
c. Ekonomi.....	66
d. Politik	69
B. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana	72
C. Faktor Sistem yang Digunakan	78
D. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi	84
E. Faktor Pendanaan	87
F. Faktor Pembangunan Ekonomi (<i>Economic Development Approach</i>)	88
a. Aliran Klasik	88
b. Aliran Keynesian	91
c. Aliran Neoklasik	92
G. Pendekatan-pendekatan Lain	93
BAB IV: STRUKTUR RUANG DAN PERWILAYAHAN	108
A. Definisi Ruang	108
B. Ruang Sebagai Wilayah	109
C. Pengertian Wilayah untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	112
D. Jenis-Jenis Perwilayahan	115
E. Kebaikan dan Keburukan Masing-Masing Jenis Perwilayahan.....	117
BAB V: KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH..	122
A. Mendorong Ekspor	122
B. Komoditi untuk Kebutuhan Lokal.	124
C. Pentingnya Menarik Investor	128
D. Pengembangan Fisik dan Struktur Perekonomian	130
E. Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Produksi	139
BAB VI: PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG	144
A. Dokumen Politik.	144
B. Belum Mendapat Dukungan Politik	144
C. Perencana dan Pelaksana Kurang Berinteraksi.	145
D. Penentuan Alternatif Pilihan.	145
E. Kurang Didukung dengan Data Statistik.	146
F. Kurang Menguasai Teknik-teknik Perencanaan.	146

G. Kemampuan Administrasi Pemerintah.....	147
a. Penyusun Rencana.	148
b. Penyusunan Program Rencana.	149
c. Tahap Lanjutan Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana.	150
d. Tahap Pengawasan Pelaksanaan Rencana.	150
e. Proses Perencanaan dan Evaluasi.	151
BAB VII: MEMILIH WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN	152
A. Biaya Komparatif.....	154
B. Implikasi Kebijakan.....	156
C. Pengertian Pembangunan Regional.....	157
D. Konsep Wilayah.....	159
E. Pelaksanaan Pembangunan Regional.....	163
BAB VIII: WILAYAH SEBAGAI SUATU ELEMEN STRUKTUR SPASIAL.....	165
A. Problema utama ekonomi wilayah.....	165
B. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	167
C. Pengembangan Konsep Tata Ruang Ekonomi.....	169
BAB IX: ANALISA EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH.....	176
A. Keadaan Ekonomi Indonesia.....	176
B. Perbandingan Tingkat Hidup.....	178
C. Proses Pembangunan dan Keterlibatan Masyarakat.....	180
D. Penggunaan Model Ekonomi.....	185
E. Menentukan Tingkat Investasi.....	189
DAFTAR PUSTAKA.....	197

BAB I

RUANG LINGKUP EKONOMI REGIONAL

A. Pengertian Ekonomi Regional

ILMU ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Sebetulnya sangat sulit meletakkan posisi ilmu ekonomi regional dalam kaitannya dengan ilmu lain, terutama dengan ilmu bumi ekonomi (*economic geography*). Hal inilah yang menyebabkan banyak buku ilmu ekonomi regional tidak memberikan definisi tentang ilmu tersebut. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Ilmu bumi ekonomi mempelajari gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku umum. Prinsip-prinsip ini dapat dipakai dalam membuat kebijakan pengaturan penggunaan ruang wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan umum yang hendak dicapai.

Hal-hal yang dibahas dalam ilmu bumi ekonomi, antara lain mengenai teori lokasi. Dengan demikian perlu dipertanyakan apakah ilmu

ekonomi regional masih memiliki bidang yang dapat digarapnya yang berbeda dengan bidang yang telah digarap oleh ilmu lain. Jawabnya adalah, ya, ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan itu secara individual, yaitu mempelajari dampak satu atau sekelompok kegiatan di satu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi tersebut saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Baik ilmu bumi ekonomi maupun ilmu ekonomi maupun ilmu ekonomi wilayah mengenal dan mempergunakan beberapa istilah yang sama, misalnya wilayah *nodal*, wilayah homogen, kota dan wilayah belakangnya, tetapi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Masalah yang pelik adalah bahwa para pemikir pertama tentang ekonomi dan lokasi seperti Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1954) dianggap sebagai pemberi landasan teori, baik bagi ilmu bumi ekonomi maupun bagi ilmu ekonomi regional. Walaupun begitu, keduanya masih bisa dibedakan, yaitu yang satu melihatnya dari segi kegiatan individual sedangkan yang lain melihatnya dari segi wilayah. Kalaupun ada perincian lebih lanjut hanya sebatas sektor (kumpulan kegiatan sejenis) dan bukan kegiatan individual. Unit analisis ekonomi regional adalah wilayah ataupun sektor dan bukan kegiatan individual.

Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi lain yang terakhir berkembang adalah ilmu ekonomi lingkungan sebagai pecahan dari ilmu ekonomi regional. Pemikiran ke arah ekonomi regional secara sepotong-sepotong dicetuskan oleh Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1954). Namun secara umum Walter Isard adalah

BAB II

TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

A. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Regional

DALAM melaksanakan pembangunan diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan korelasi antara faktafakta yang diamati, sehingga dapat menjadi kerangka orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang diperkirakan akan terjadi. Dengan makin majunya studi-studi pembangunan ekonomi, banyak teori telah diintroduksi. Dalam pembangunan wilayah, banyak teori dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pentingnya pembangunan wilayah.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antarwilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Semua faktor di atas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah-pisah satu sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan wilayah regional secara komprehensif.

Dalam pembangunan ekonomi wilayah (regional) dapat dikemukakan beberapa teori yang penting, yakni (i) pemikiran-pemikiran menurut beberapa aliran dalam ilmu ekonomi (misalnya Klasik, Neoklasik, Harrod-Domer, Keynes dan Pasca Keynes), teori basis ekspor, teori sektor, struktur industri dan pertumbuhan wilayah, dan teori kausasi kumulatif. Selanjutnya akan dibahas pula teori lokasi dan aglomerasi, teori tempat sentral, teori kutub pertumbuhan, dan teori pembangunan polarisasi.

a. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dipelopori oleh Adam Smith (yang dianggap sebagai bapak ekonomi) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan, dampaknya mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran (kesejahteraan) Penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal.

Doktrin atau semboyan aliran Klasik adalah '*laissez faire laissez passé*' atau persaingan bebas, artinya pemerintah tidak campur tangan dalam perdagangan dan perekonomian. Pemikiran dan pandangan beberapa tokoh atau pengikut aliran Klasik dapat dikemukakan yaitu:

Menurut Adam Smith (dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi) untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL

SEBAGAIMANA layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. Substansi permasalahan yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor dimaksud.

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (D-SE)* yang dituangkan dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah (1999), hal-hal yang dapat memengaruhi perencanaan pembangunan daerah antara lain meliputi:

1. Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri;
2. Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya;
3. Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana;
4. Koordinasi yang baik;
5. *Top down* dan *bottom up planning*;
6. Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus;
7. Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat. Namun secara

umum, dapat dikemukakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk pada faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembangunan yang antara lain meliputi:

A. Faktor Lingkungan

Pertama adalah faktor lingkungan, baik eksternal maupun internal, yang dapat mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagaimana telah dikemukakan, lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Faktor-faktor lingkungan tersebut bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Faktor eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga, atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional. Sedangkan faktor internal, merupakan pengaruh yang datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri. Unsur-unsur yang berada dalam faktor lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang:

a. Sosial

Hampir di setiap negara berkembang, perencanaan pembangunan daerah selalu diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat menjadi tujuan atau objek dari sebuah perencanaan sekaligus juga menjadi aktor atau subjek perencanaan. Dalam konteks perencanaan sosial, Schoorl (1984) menyatakan bahwa 'perencanaan sosial dapat berarti perencanaan untuk masyarakat (*societal planning*)'. Ini berarti bahwa perencanaan sosial memiliki tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan di mana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan.

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasil-

BAB IV

STRUKTUR RUANG DAN PERWILAYAHAN

A. Definisi Ruang

APABILA kita menyebut kata ruang, apa sebetulnya yang terbayang dalam benak kita. Apakah ruang itu abstrak atau riil. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkret dari itu, sedangkan kalau riil maka ruang itu memiliki batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang lainnya. Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi bisa juga sangat luas. Kita bisa membayangkan bahwa ruang hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda tersebut. Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda atau kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda atau kegiatan. Dalam hal ini kata 'tempat' adalah berdimensi tiga dan kata benda atau kegiatan berarti benda atau kegiatan apa saja tanpa batas. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri atau karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas, ruang tamu berisi benda ataupun kegiatan sebagai tempat menerima tamu, dan lain-lain. Tanpa ruang maka suatu benda atau kegiatan tidak mungkin berada di sana. Dalam bahasa Inggris,

padanan kata ruang adalah *space*. Menurut kamus *Webster*, *space* dapat diartikan dengan berbagai cara, namun di sini dikutip dua cara:

1. *The three dimensional continuous expanse extending in all directions and containing all matter: variously thought of as boundless or intermediately finite area or room sufficient for or allotted to something.*
2. Kamus *Random House* menulis, *space: a particular extent of surface.*

Dengan demikian, secara umum ruang dapat diartikan dengan tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Sebetulnya ada tiga kata yang sering bisa dipertukarkan, yaitu ruang, tempat, dan lokasi. Di antara ketiga kata ini ruang adalah yang bersifat umum, tidak terikat dengan isi maupun lokasi. Tempat sering kali dikaitkan dengan keberadaan suatu benda atau kegiatan yang telah ada atau sering ada di situ. Lokasi terkait dengan posisi apabila di permukaan bumi bisa ditentukan bujur dan lintangnya. Lokasi sering terkait dengan pemberian nama atau karakter atas sesuatu tempat sehingga dapat dibedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Karena ruang bisa menyangkut apa saja yang membutuhkan tempat maka harus ada batasan tentang ruang yang ingin dibicarakan. Dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah ruang sebagai wilayah.

B. Ruang Sebagai Wilayah

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi. Karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi itu adalah sejauh manusia

BAB V

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH

DARI berbagai teori atau model yang telah diuraikan terdahulu akan dicoba untuk menyimpulkan langkah-langkah atau kebijakan yang perlu ditempuh oleh seorang kepala daerah atau perencana pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya, yang secara umum berarti meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

A. Mendorong Ekspor

Sejalan dengan teori basis ekspor, perlu didorong pertumbuhan dari sektor-sektor yang hasil produksinya dapat dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah, terutama ekspor ke luar negeri. Sebetulnya usaha untuk menjual suatu produk ke luar daerah tidak mudah. Apabila daerah lain juga menghasilkan produk yang sama, daerah itu harus mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik atau minimal sama tetapi dengan harga pokok yang lebih rendah (efisien). Hal yang sama juga berlaku untuk pemberian jasa yang bisa mendatangkan pelanggan atau uang dari luar daerah, misalnya pariwisata.

Sebagai akibat krisis ekonomi, banyak masyarakat golongan bawah yang terpaksa dibantu oleh pemerintah. Ada bantuan yang bersifat materi (diberi jatah beras dengan harga subsidi), tetapi ada juga dalam

bentuk penyediaan lapangan kerja (sementara) dan bantuan modal kepada pengusaha kecil dan menengah (UKM). Sesuai dengan teori basis bagi bantuan penyediaan lapangan kerja (sementara), dan bantuan modal UKM, harus diarahkan ke sektor basis (ekspor) dan bukan ke sektor pelayanan (*service*). Apabila bantuan itu digunakan untuk sektor pelayanan, dampak penggangannya bersifat jangka pendek dan tidak membuat volume kegiatan ekonomi bertambah secara permanen. Unit usaha yang dibantu memang berkembang, tetapi dengan korban unit usaha sejenis lainnya yang tidak dibantu. Hal ini terjadi karena total daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tidak bertambah. Hal ini juga terjadi apabila banyak masyarakat yang berusaha di sektor pelayanan (dagang kecil-kecilan atau jasa) karena sulitnya mencari lapangan kerja di sektor riil. Apabila jumlah usaha bertambah tetapi daya beli total tidak naik, pendapatan rata-rata per unit usaha menjadi menurun. Apabila bantuan itu ditujukan ke sektor basis, akan tercipta efek pengganda. Hal itu karena unit usaha basis yang dibantu dan beberapa unit usaha pelayanan akan berkembang, tetapi tidak ada unit usaha yang dirugikan (menurun volume kegiatannya). Memang tidak mudah menciptakan lapangan kerja di sektor basis, tetapi masih mungkin apabila direncanakan secara matang melalui kerja sama berbagai pihak. Misalnya di suatu daerah pemerintah merencanakan memberi pekerjaan kepada 500 penganggur selama 30 hari. Pada saat yang sama, pemerintah juga memberi bantuan modal kepada 30 UKM masing-masing 30 juta rupiah. UKM yang dibantu diseleksi hanya yang bergerak di sektor basis atau dapat mengalihkan usahanya ke sektor basis. Kegiatan sektor basis misalnya: berbagai usaha kerajinan atau kegiatan sektor pertanian atau agribisnis yang produknya laku dijual ke luar negeri. Selama ini para penganggur hanya diarahkan pada kegiatan yang sifatnya kepentingan umum seperti pembersihan parit atau selokan, pembabatan rumput jalan, atau pembersihan sampah perkotaan: Kegiatan ini memang bermanfaat, tetapi bersifat sementara dan

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG

PERMASALAHAN yang muncul pada perencanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia sebagai berikut:

A. Dokumen Politik.

Perencanaan ekonomi atau perencanaan pembangunan di banyak negara baru berkembang sering kali lebih merupakan dokumen politik mengenai cita-cita pembangunan yang dikehendaki, tetapi bukan merupakan cetak biru bagi kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu. Perencanaan pembangunan tidak terkait antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Sebagai refleksi daripada kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan politik yang ada dalam masyarakat, maka rencana yang dapat diterima secara politis, mungkin kehilangan cirinya yang utama sebagai rencana, yaitu konsistensi dan skala prioritas.

B. Belum Mendapat Dukungan Politik

Perencanaan dirumuskan secara teknis cukup baik. Kelemahannya adalah sering kali kurang mendapat dukungan politik yang diperlukan. Kecuali itu yang lebih sering terjadi adalah karena memang kurang

terdapat kestabilan politik yang memungkinkan pelaksanaan rencana secara kontinu. Pemerintahan yang silih berganti mengakibatkan silih berganti pula pelaksanaan rencana, bahkan mungkin silih berganti perencanaan. Rencana harus mempunyai cukup dukungan politik dan cukup waktu pematangannya sehingga dapat melibatkan aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaannya.

C. Perencana dan Pelaksana Kurang Berinteraksi.

Kelemahan lain adalah sering kali terdapat kurang hubungan antara penyusunan rencana dan para penyusunnya dengan pelaksanaan rencana dan para pelaksananya. Ini menyebabkan rencana menjadi kurang fleksibel (kurang dapat dilaksanakan secara teknis. Hal ini bisa disebabkan karena para perencana terlalu banyak bekerja di belakang meja, ataupun karena kurang kuat kedudukan suatu badan perencana dalam hubungannya dengan badan-badan operasional. Satu aspek dari hubungan ini adalah kelemahan hubungan antara perencanaan dan kebijaksanaan anggaran serta moneter. Tentang ini misalnya Edward Mason mengemukakan tentang salah satu kelemahan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956—1960.

Namun demikian sebenarnya kelemahan rencana ini adalah kelemahan dalam pembentukan organisasi dan administrasi perencanaan sebagai suatu proses yang harus dilakukan oleh banyak badan atau lembaga pemerintahan. Suatu jaringan keserasiandan kerja sama dalam pembentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan perumusan program-program pembangunan.

D. Penentuan Alternatif Pilihan.

Banyak kelemahan rencana juga terjadi dalam bidang pilihan-pilihan berbagai alternatif yang merupakan *trade offs* (menguntungkan bagi yang satu merugikan bagi yang lainnya). Pilihan pada penetapan tujuan dan kebijaksanaan dasar ini akan diuraikan pada Bab mengenai

BAB VII

MEMILIH WILAYAH UNTUK PEMBANGUNAN

PEMILIHAN wilayah di mana pembangunan akan dilaksanakan sering kali merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, serta tidak mudah dipecahkan secara teoretis ataupun paling sedikit menggunakan analisis matematis atau analisis kuantitatif. Walaupun demikian harus diusahakan sejauh mungkin dapat memenuhi pemikiran yang paling relevan yang dalam garis besarnya dibagi dalam dua kategori, yakni: pertama, kontribusi para ahli teori khususnya doktrin biaya kooperatif, pertumbuhan ekonomi, teori lokasi dan tata ruang. Kedua kontribusi empiris, seperti studi hierarki kota, investigasi sejarah kota, pola migrasi, dan pengaruh urbanisasi.

Sejumlah negara-negara yang sedang membangun seperti Portorico, Venezuela, dan Turki, walaupun telah mencapai tahap perkembangan ekonomi, negara-negara tersebut menghadapi persoalan yang sama, yaitu memiliki beberapa wilayah metropolitan besar yang merupakan wilayah, berkembang yang pesat akan tetapi diliputikeparahan. Di samping itu terdapat pula wilayah *hinterland* yang sangat primitif dan terbelakang. Di negara-negara yang telah maupun seperti Amerika Serikat dan Inggris juga terdapat yang relatif semacam itu, akan tetap perbedaannya di negara-negara yang sedang membangun wilayah-wilayah terbelakang tersebut merupakan unsur yang dominan, sebab disebabkan

karena terlalu luas arealnya dan sebagian lagi disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya yang besar, akan tetapi belum dimanfaatkan sehingga memertukan penyediaan modal dan keterampilan dalam jumlah yang sangat besar.

Di kota-kota besar telah dirasakan banyak bengkalai yang harus segera ditanggulangi, misalnya permukiman yang sangat padat, kongesti arus lalu lintas, kekurangan jasa pelayanan masyarakat kota yang esensial seperti fasilitas air minum, listrik, pemadam kebakaran dan lainnya. Di lain pihak di daerah *hinterland* terdapat kesulitan untuk menciptakan kesempatan investasi dan kesulitan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara penuh. Oleh karena itu ada pihak yang menganjurkan perlunya untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru (*new growth process*) dan mempersiapkan pembangunan wilayah-wilayah penerima migrasi disebabkan karena wilayah-wilayah perkotaan mengalami keterbatasan untuk menampungnya.

Dalam pembahasan pembangunan sering kali terjadi perbedaan Pendapat antara perencana fisik dan ahli ekonomi. Walaupun sifatnya tidak selamanya mutlak, akan tetapi dikemukakan bahwa banyak di antara perencana fisik, misalnya arsitek, perencana kota, dan insinyur mempunyai kecenderungan lebih mengonsentrasikan pada pemikiran tingkat lokal dan wilayah tetap kurang berorientasi kepada kebijaksanaan dan program-program pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan perencana ekonomi biasanya melakukan analisis dan menyusun program secara agregatif dan sektoral. Mereka menekankan pada kepentingan tingkat nasional yakni meliputi pendapatan nasional, tabungan dan investasi, serta variabel-variabel lainnya yang mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan ekonomi, misalnya perkembangan jumlah penduduk, produksi sektor pertanian dan perindustrian, tenaga kerja, tingkat produktivitas, dan sebagainya. Ahli-ahli ekonomi mengkaji pula kebutuhan dan kemungkinan investasi dalam sektor-sektor strategis, seperti pada sektor pertanian, industri,

BAB VIII

WILAYAH SEBAGAI SUATU ELEMEN STRUKTUR SPASIAL

A. Problema utama ekonomi wilayah

EKONOMI wilayah adalah suatu studi yang mempelajari perilaku ekonomi dari manusia di atas tata ruang. Studi ini menganalisis proses ekonomi dalam lingkungan spasial (mengenai tata ruang) dan menempatkan ke dalam struktur lanskap ekonomi (*economic landscape*). Sebagaimana diketahui bahwa teori ekonomi tradisional telah lama tidak mau mengenai aspek spasial dari perilaku ekonomi. Model-model klasik dibuat berdasar pada asumsi bahwa kegiatan ekonomi terjadi pada satu titik waktu (*one point*) tanpa memperhitungkan dimensi spasial. Pertanyaan utama dari ekonomi klasik adalah berkisar pada: *what to produce, how to produce dan for whom to produce*, yang artinya komoditas apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa komoditas tersebut diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dianalisis tanpa memasukkan unsur jarak dan menganggap tidak ada biaya pengangkutan.

Tantangan bagi ekonomi regional yakni dapat dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai gejala-gejala ekonomi akan menjadi lebih penting dan nyata apabila faktor tata ruang diintroduksikan sebagai suatu variabel tambahan dalam kerangka teori ekonomi. Secara eksplisit pertimbangan mengenai pentingnya dimensi tata ruang tersebut meliputi lima persoalan utama ekonomi wilayah.

Pertama, adalah yang berhubungan dengan penentuan lanskap ekonomi, yaitu mengenai penyebaran kegiatan ekonomi atas tata ruang. Dalam hubungan ini beberapa pertanyaan dapat dikemukakan, misalnya faktor apa yang memengaruhi lokasi kegiatan individual? Bagaimana dapat dijelaskan penyebaran kegiatan produksi pertanian di atas suatu permukaan tanah yang luas? Hipotesis apa yang relevan untuk menentukan lokasi usaha tertentu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor tersier? Model apa yang dapat digunakan untuk menentukan perilaku spasial dari lokasi permukiman? Bagaimana teori lokasi spasial dapat diintegrasikan dalam suatu sistem general? Bagaimana suatu daerah dapat dicirikan sebagai daerah pertanian atau daerah industri dan aglomerasi penduduk? Apakah ada ketergantungan antara pengambilan keputusan mengenai lokasi secara individual? Semua pertanyaan di atas berhubungan erat dan termasuk dalam bidang persoalan utama ekonomi wilayah yang pertama yaitu persoalan penentuan lanskap ekonomi.

Kedua adalah berhubungan dengan diintroduksikannya konsep wilayah dalam analisis teoretik. Wilayah di sini diartikan sebagai subsistem spasial dari ekonomi nasional. Dengan konsep baru tersebut telah mendorong pembuatan rencana pembangunan subsistem spasial dan pengukuran aktivitas ekonominya. Beberapa kriteria telah dikembangkan untuk menentukan batasnya suatu wilayah, walaupun diakui bahwa hal ini bukan merupakan hal yang gampang.

Persoalan yang ketiga adalah menganalisis interaksi antara daerah-daerah. Dapat dibedakan dua bentuk interaksi antarwilayah yaitu: (1) arus pergerakan faktor produksi dan (2) arus pertukaran komoditas.

Penjelasan mengenai mengapa terjadi arus pergerakan faktor produksi dan komoditas, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi pada suatu wilayah itu merupakan titik sentral dalam studi permasalahan ekonomi ekonomi. Dalam hubungan ini dapat diajukan beberapa pertanyaan, di antaranya: mengapa faktor produksi berarus

BAB IX

ANALISA EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Keadaan Ekonomi Indonesia

PADA permulaan dasawarsa permulaan keadaan ekonomi Indonesia menyedihkan. Tingkat hidup masyarakat sangat rendah dan dari tahun ke tahun terjadi kemunduran. Salah satu sumber utama keadaan itu ialah adanya pendapat yang kuat dalam kalangan pemerintah Indonesia pada waktu itu, bahwa soal ekonomi tidak penting. Pada waktu itu juga ada anggapan yang kuat dalam sebagiandari masyarakat bahwa ilmu ekonomi sama sekali tidak berguna hanya *text book-thinking* dan bahkan dianggap merepotkan kehidupan masyarakat.

Adalah kenyataan yang kita maklum bersama bahwa pada waktu ini suatu proses perubahan mahabesar sedang dialami oleh umat manusia sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan serta penggunaannya yang langsung memengaruhi segala aspek penghidupan. Manusia telah berhasil mencapai kemajuan pesat dalam usahanya untuk lebih mengerti alam sekitarnya dan untuk sampai pada perumusan yang lebih baik mengenai hukum-hukum alam yang berlaku, yang kemudian dengan sadar digunakan untuk memperbaiki keadaan hidupnya sendiri. Sedemikian besar kemampuan manusia untuk mengerti hakikat hukum-hukum alam tersebut serta kemampuannya untuk menggunakannya sehingga pada waktu ini ia berdiri pada suatu persimpangan jalan arah

yang satu menuju ke tamatnya eksistensi manusia sebagai akibat kekuatan destruktif yang diciptakannya dengan ilmu pengetahuannya sendiri, sedang arah yang lain secara potensial dapat membawa seluruh umat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan martabat manusia.

Alternatif yang terakhir ini baru terdapat secara potensial belaka, oleh karena kemampuan luar biasamanusia untuk menundukkan alam itu belum lagi dibarengi dengan kemampuan yang sepadan untuk menundukkan diri sendiri. Manusia belum berhasil sepenuhnya untuk mengarahkan hubungan antara manusia dan antara bangsa sedemikian rupa sehingga manfaat penggunaan ilmu pengetahuan itu dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia.

Hal yang demikian itu tampak dengan jelas apabila kita telah mencapai tingkat kehidupan yang baik bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Dua kenyataan tampak ke depan. Yang pertama ialah adanya perbedaan yang tidak kecil dalam tingkat pendapatan rata-rata. Apabila disusun pada suatu skala tampak diskrepansi sekitar 30 kali antara tingkat pendapatan rata-rata yang terendah dan yang tertinggi.

Yang kedua, bangsa-bangsa dengan tingkat pendapatan yang tinggi memiliki pula kecepatan pertambahan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan sebagian dari bangsa-bangsa yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Kenyataan kedua hal ini ialah bahwa perbedaan dalam tingkat pendapatan bukannya makin menyempit, melainkan dengan berlangsungnya waktu justru makin menjadi besar. Dengan demikian, timbullah gejala *an everincreasing gap* antara tingkat pendapatan rata-rata yang tergolong tinggi dan yang termasuk rendah. Dalam arti perbedaan absolut, *gap* yang senantiasa membesar ini akan tetap berlangsung juga andaikata kecepatan pertambahan tingkat pendapatan rata-rata yang dialami kedua golongan tersebut adalah identik. Hal yang demikian itu adalah akibat yang wajar dari kenyataan bahwa suatu perbedaan yang besar dalam *initial level*

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Raharjo, 2007, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*.
- Albert Waterston, *Development Planning. Lessons of Experience*, 1965.
- Arsyad, L., 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.
- Arzaghi, M., dan Henderson, J.V., 2005, "Why Country are Fiscally Desentralizing", *Journal of Public Economics*, Vol.89, 2005, 1.157-1.189.
- Azis, I.J., 1994, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LPFE UI.
- Bendavid-Val, Avrom, 1991, *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, Fourth Edition, Praeger Publishers, New York
- Blakely, E.J., 1994, *Planning Local Economic Development; Theory and Practice*, Second edition, Sage Publication.
- Boediono, 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta, BPEF.
- Bryson, J.P., dan Cornia, G.C., "Fiscal Desentralization in Economic Transformation: The Czech and Slovak", *Europe-Asia Studies*, Vol. 52, No.3, 2000, 507-522.
- Caporaso, James A. Dan David P. Levine, 1992, *Theories of Political Economy*, Cambridge University Press, USA.
- Chandra, Rajesh. 1992. *Industrialization and Development in The Third World*. Chapman and Hall, New York
- Chaniago, Andrianof A. 2001. *Gagainya Pembangunan; Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. LP3ES. Jakarta
- Case, K.E., and Fair, R.C., 2007, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Edisi 8, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Conyers, D., and Hills, P., 1994, *An Introduction to Development Planning in the Third World*, John Wiley & Sons Ltd,
- Damsar, 2002. *Sosiologi Ekonomi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

- Davoodi, H., and Zou, H., "Fiscal Decentralization and Economic Growth: a Cross-Country Study", *Journal of Urban Economics*, Vol. 43, 1998, 244-257.
- Douglas S. Paauw, Development Planning in Asia, "Centre for Development Planning. National Association, 1965.
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 2003.
- Edward S. Mason, Economic planning in underdeveloped areas, Forham University Press, 1958.
- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2002, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Feltenstein, A., and Iwata, S., "Decentralization and Macroeconomic Performance in China: Regional Autonomy has its costs", *Journal of Development Economics*, Vol. 76, 2005, 481-501.
- Freiden, Jeffrey. 2000. *The Method of Analysis: Modern Political Economy*" Dalam Jeffrey Freiden, Manuel Pastor JR., Michael Torriz. *Modern Political Economy and Latin America: Theory and Policy*. Boulder. Westview Press.
- Friend, Theodore. (2003). *Indonesian Destinies*. Cambridge, MA: Beiknap Press.
- _____, 2000, *Jalan Ketiga; Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terjemahan dari *The Third Way, The Renewal Of Sosial Democracy*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Green, Donald P. dan Ian Shapiro, 1994, *Pathologies of Rational Choice Theory; A Critique of Applications in Political Science*, Yale University Press, New Heaven and London.
- Gujarati, Damodar, 1999, *Essentials of Econometrics*, Second Edition, Irwin Mc Graw-Hill
- Hakim, C. 1987. *Research Design: Strategies and Choices in the Design of Social Research*. Alien and Unwin. London

- Herry, Edy Priyantoro. 2001. *Paradoks Modernitas Dalam Pembangunanisme; Diskursus Kapitalisme Menjelang Runtuhnya, Orde Baru*, Tesis, Program Pasca Sadana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Heru, Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Pustaka Pengajar, Yogyakarta, 2001.
- Hettne, Bjorn, *Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia*, Terjemahan Dari *Development Theory and The Three Worlds*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Homans, George C., 1964, Bringing Men Back In, *American Sociological Review* 29 (December): 809-818.
- Hoover, E., dan Giarratani, F., 1984, *An International to Regional Economics*, Third Edition, Alfred A. Knopf. Inc, New York
- Iimi, Atsushi, "Decentralization and Economic Revisited: an Empirical Note", *Journal of Urban Economics*, Vol. 57, 2005, 449-461.
- Jin, J., dan Zou, H., "Fiscal Desentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China", *Journal of Asian Economics*, Vol.16, 2005, 1.047-1.064.
- _____, "How does Fiscal Decentralization Affect Aggregate, National, and Subnational Government Size?", *Journal of Urban Economics*, Vol. 52, 2002, 270-293.
- Kunarjo, 2002., *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, UI-Press, Jakarta
- Kunarjo. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI Press, Jakarta, 2002.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- _____, 2002, *Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Lazlo, E. 1997. *The 3rd Millennium: The Challenge and The Vision*. Planetary, Consciousness Network (PCN) Ltd.
- Loekman Soetrisno. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta. 1005.

- Louis J. Walinsky, *The planning and execution of economic development*. McGraw-Hill Book Comp. Inc., 1963.4
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Martines, J.V., dan Robert., 2003, "Fiscal Decentralization and Economic Growth", *World Development*, Vol. 31, No. 9.
- Mas'ood, Mohtar, 1994, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mefi Hermawanti dan Hesti Rinandari, *Modul Pemberdayaan Masyarakat Adat*, 2003.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Terjemahan Tjetjep Rohendi), UI Press, Jakarta, 1992.
- Moelyarto Tjokro Winoto, *Beberapa Teknik Dalam Hubungan Kerja*, Buletin BPA UGM, Yogyakarta, 1994.
- Mubyarto, 2005, *A Development Manifesto*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Pessach, A.R., "Can Decentralization be Beneficial?", *Journal of Public Economis*, Vol. 89, 2005, 1.231-1.249.
- Rahardja, P., dan Manurung, M., 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Resosudarmo, B.P., Nurdianto, D.A., and Hartono, D., "The Indonesian Inter-Regional Social Accounting Matrix for Fiscal Decentralisation Analysis", *Journal of Indonesia Economy and Business*, Volume 24, Number 2, September 2009.
- Samuelson, P.A., dan Nordhaus, W.D., 2004, *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Seabright, Paul., "Accountability and Decentralisation in Government: an Incomplete Contracts Model", *European Economic Review*, Vol. 40, 1996, 61-89.
- Sjafrizal, 1997, "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat". *Prisma*, No.3, 27-38.
- Smoke, P., dan Lewis, B.D., 1999, "Fiscal Desentralization in Indone-

- sia: A New Approach to Old Idea", *World Development*, Vol. 24, No. 8, 1996, 1.281-1.299.
- Suyanto, 2008, Pengaruh Dana Desentralisasi dan Ketimpangan Fiskal Vertikal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, tidak dipublikasikan.
- Suwanan, A.F., dan Sulistiani, E.H., "Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence, *Journal of Indonesia Economy and Business*, Volume 24, Number 3, September 2009.
- Rcafe. Asian Planners Conference, "Review of longterm economic projection for selected communities of the Ecafe Region" dan "Review of longtermmacro economic projection for selected countries of the Ecafe Region", October 1964.
- Tarigan Robinson, 2005, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara Jakarta.
- , 2003, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Todaro, M.P., 1997, *Economic Development*, Sixth edition, Addison Wesley Longman Limited, England.
- Vazquez, J.M., and McNab, R. M., "Fiscal Decentralization and Economic Growth", *World Development*, Vol. 31, No.9, 2003, 1.597-1.616.
- W. Arthur Lewis, *Development Planning. The essentials of economic policy*. Harper and Row, New York,
- Xie, D., Zou, H., and Davoodi, H., "Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States", *Journal of Urban Economics*, Vol. 45, 1999, 228-239.[]